

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Deskripsi Perusahaan

Kementerian Pekerjaan Umum merupakan instansi pemerintah yang menangani urusan pekerjaan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan informasi resmi Kementerian Pekerjaan Umum, tugas kementerian ini mencakup penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum. Ruang lingkupnya meliputi penyelenggaraan jalan, pengelolaan sumber daya air, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, drainase lingkungan, persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan strategis, pembiayaan infrastruktur, hingga pembinaan jasa konstruksi (Kementerian Pekerjaan Umum, 2025; Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2024).

Dalam pembangunan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum memiliki posisi penting karena menangani infrastruktur dasar yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur pekerjaan umum tidak hanya dilihat sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai layanan yang mendukung mobilitas, konektivitas wilayah, kegiatan ekonomi, dan kualitas hidup. Oleh karena itu, setiap program perlu dikelola secara terencana, dilaksanakan dengan baik, dievaluasi, dan diinformasikan kepada masyarakat secara jelas sesuai arah pembangunan infrastruktur nasional (Kementerian Pekerjaan Umum, 2025).

Salah satu unit di bawah Kementerian Pekerjaan Umum adalah Direktorat Jenderal Bina Marga. Unit ini berfokus pada penyelenggaraan jalan. Mengacu pada informasi resmi Direktorat Jenderal Bina Marga, tugas utamanya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, 2025). Melalui tugas tersebut, Bina Marga menjadi bagian penting dalam pengelolaan jalan nasional dan jembatan yang mendukung konektivitas antardaerah.

Fungsi Direktorat Jenderal Bina Marga meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan jalan nasional, penguatan konektivitas prioritas nasional, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, pelaporan, administrasi, serta fungsi lain yang diberikan oleh Menteri (Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, 2025a). Dengan fungsi yang cukup

luas, pekerjaan Bina Marga tidak berhenti pada pembangunan jalan, tetapi juga menyangkut perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pelaporan kinerja penyelenggaraan jalan.

Dalam pelayanan publik, peran Bina Marga berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang aman, layak, dan berkelanjutan. Program pembangunan serta preservasi jalan perlu dijelaskan kepada publik agar masyarakat mengetahui tujuan, manfaat, lokasi, waktu pelaksanaan, dan dampak kegiatan. Informasi seperti ini penting karena infrastruktur jalan berhubungan dengan aktivitas sehari-hari, mulai dari perjalanan kerja, pendidikan, distribusi logistik, kegiatan ekonomi, sampai akses menuju layanan dasar.

Kebutuhan tersebut juga berhubungan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan bagian penting dalam kehidupan bernegara. Karena itu, instansi pemerintah perlu menyediakan informasi yang benar, mudah diakses, dan dapat dipahami. Dalam praktiknya, komunikasi publik menjadi penghubung antara kegiatan lembaga dan kebutuhan informasi masyarakat.

Di Direktorat Jenderal Bina Marga, komunikasi publik berhubungan dengan pelayanan informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Informasi resmi Direktorat Jenderal Bina Marga menyebutkan bahwa Subbagian Komunikasi Publik berada pada Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, dengan salah satu tugas menyelenggarakan komunikasi publik (Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, 2025). Hal tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi publik merupakan bagian dari alur kerja organisasi dalam melayani masyarakat, bukan sekadar kegiatan tambahan.

Pada saat magang, penulis ditempatkan di bidang publikasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan pengelolaan konten media sosial. Berdasarkan catatan harian, kegiatan yang dilakukan antara lain riset tren TikTok, diskusi ide konten, penyusunan content plan, pembuatan script, shooting, dokumentasi kegiatan kantor dan lapangan, editing video, pembuatan caption, penjadwalan unggahan, pengunggahan konten, dan evaluasi performa konten. Rangkaian pekerjaan tersebut menunjukkan bahwa publikasi digital menjadi cara instansi menyampaikan pesan dengan bentuk yang lebih sederhana dan menarik.

Media sosial dipilih karena dapat menjangkau masyarakat secara cepat dan luas. Pada akun pemerintah, konten media sosial tidak hanya mengejar jumlah tayangan, tetapi juga membantu masyarakat memahami informasi yang bersifat teknis. Oleh sebab itu, konten perlu disusun dengan memperhatikan akurasi, pilihan kata, visual, dan karakter platform. Dalam hal ini, publikasi dan dokumentasi membantu mengubah informasi kelembagaan menjadi pesan visual yang lebih mudah diterima audiens digital (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018).

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Direktorat Jenderal Bina Marga dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Marga. Dalam menjalankan tugas kelembagaan, Direktur Jenderal didukung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal serta beberapa direktorat teknis dengan ruang lingkup masing-masing. Susunan ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan, pelaksanaan program, koordinasi teknis, administrasi, dan evaluasi dilakukan melalui pembagian fungsi yang teratur (Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, 2025).

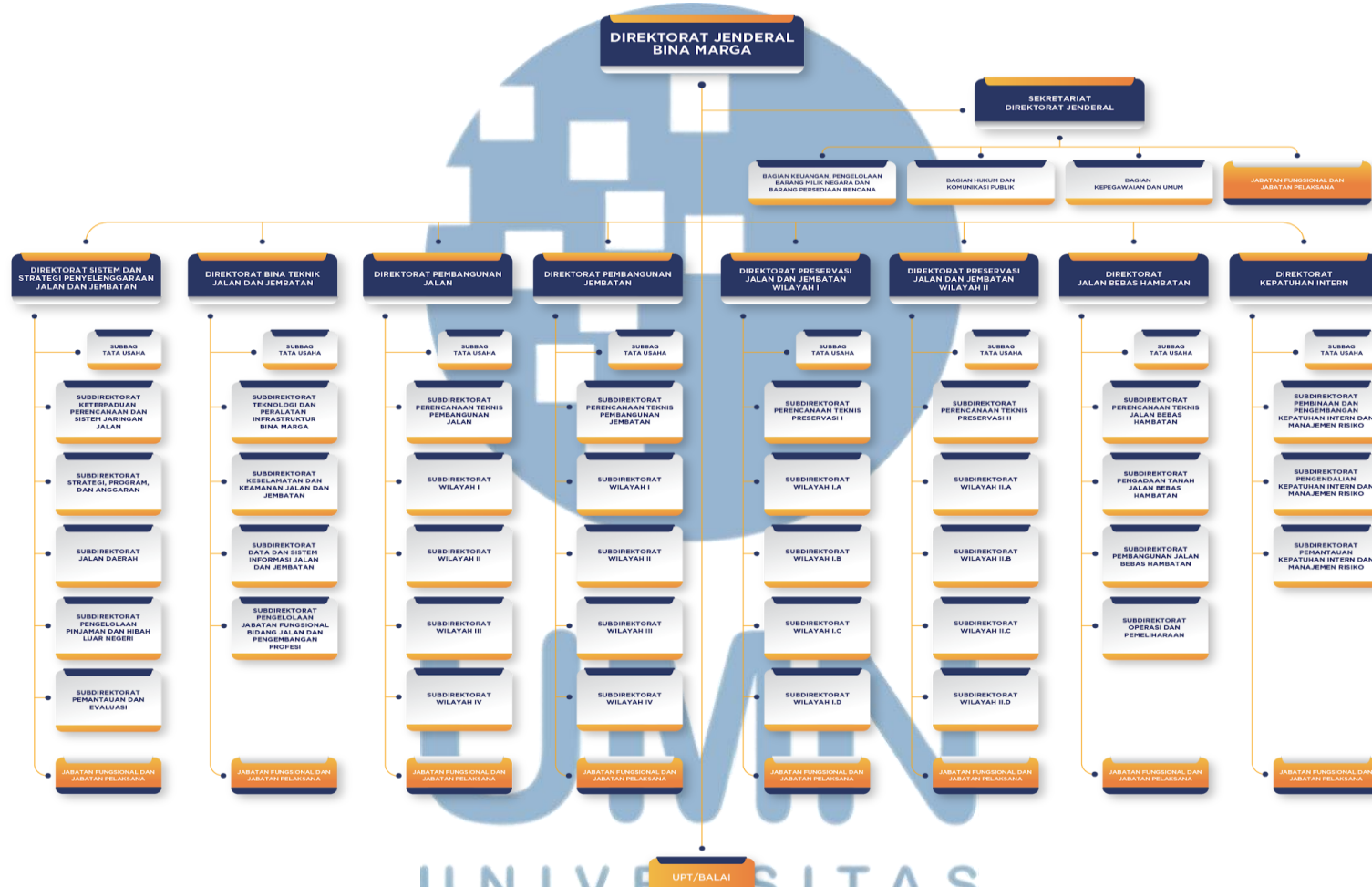
Sekretariat Direktorat Jenderal memiliki peran pendukung dalam administrasi organisasi. Berdasarkan struktur organisasi, unsur sekretariat mencakup Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan Bencana; Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; Bagian Kepegawaian dan Umum; serta jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Untuk kegiatan magang penulis, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menjadi bagian yang paling relevan karena di dalamnya terdapat fungsi komunikasi publik, publikasi, dokumentasi, pelayanan informasi, dan pengelolaan pengaduan masyarakat (Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, 2025).

Di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga terdapat beberapa direktorat teknis dengan fokus kerja yang berbeda. Struktur resmi memuat Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Pembangunan Jalan, Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, serta Direktorat Kepatuhan Intern (Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, 2025). Pembagian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan jalan membutuhkan kerja sama antara perencanaan, pembangunan, preservasi, pembinaan teknis, pengawasan, dan kepatuhan internal.

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan berkaitan dengan strategi, program, sistem jaringan, kerja sama, serta pemantauan dan evaluasi. Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan lebih banyak menangani aspek teknis, seperti teknologi dan peralatan infrastruktur, keselamatan, keamanan, data, sistem informasi, serta pengelolaan jabatan fungsional. Sementara itu, direktorat pembangunan dan preservasi menangani pembangunan maupun pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai wilayah kerja. Pembagian ini membuat proses kerja organisasi menjadi lebih fokus dan terukur.

Dalam struktur tersebut, publikasi dan dokumentasi tetap berkaitan dengan unit teknis. Informasi yang akan dipublikasikan umumnya berasal dari program, kegiatan, atau data teknis yang dikelola oleh unit lain. Oleh karena itu, tim publikasi perlu berkoordinasi agar informasi yang disampaikan tetap akurat, tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan sesuai dengan pesan kelembagaan. Kondisi tersebut juga ditemui oleh pemegang ketika melakukan peninjauan rekaman video, berdiskusi mengenai konsep visual, serta menerima masukan dari pembimbing sebelum konten dipublikasikan.

Koordinasi dalam publikasi dan dokumentasi dilakukan agar setiap konten memiliki tujuan komunikasi yang jelas. Alur kerja biasanya dimulai dari arahan atau kebutuhan konten, dilanjutkan dengan riset tren, penyusunan ide, penulisan script, pengambilan gambar, editing, review, revisi, penjadwalan, unggahan, dan evaluasi performa. Alur tersebut memperlihatkan bahwa konten media sosial pemerintah tetap melalui proses kerja profesional, meskipun hasil akhirnya sering berupa video pendek atau unggahan sederhana (Quesenberry, 2021; Wilcox et al., 2024).



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (2025)

Berdasarkan Gambar 2.1, komunikasi publik berada dalam unsur sekretariat, tepatnya pada Bagian Hukum dan Komunikasi Publik. Posisi ini memperlihatkan bahwa komunikasi publik memiliki peran pendukung yang strategis karena informasi kepada masyarakat harus sejalan dengan kebijakan, ketentuan hukum, dan kepentingan lembaga. Bagi penulis, struktur ini menunjukkan bahwa pekerjaan publikasi tidak hanya membutuhkan kreativitas, tetapi juga ketelitian dalam menjaga akurasi informasi dan citra instansi.

2.3 Portofolio Perusahaan

Sebagai instansi pemerintah, portofolio Direktorat Jenderal Bina Marga tidak berupa produk komersial seperti perusahaan swasta, melainkan terwujud dalam program, layanan, kebijakan, dan hasil kerja kelembagaan di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan. Ruang lingkup portofolio teknis tersebut mencakup perencanaan sistem jaringan jalan, pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan, pengelolaan jalan bebas hambatan, pembinaan teknis, penguatan konektivitas prioritas nasional, serta layanan informasi publik (Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, 2025; Kementerian Pekerjaan Umum, 2025).

Dalam lima tahun terakhir, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional yang menjadi bagian dari portofolio unggulan instansi. Berdasarkan Rencana Strategis 2020–2024, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan nasional baru sepanjang 3.500 km, dengan pencapaian kumulatif jalan nasional baru sejak 2020 sampai dengan 2022 telah mencapai 1.444 km. Pada Tahun Anggaran 2024, capaian output utama Ditjen Bina Marga meliputi pembangunan jalan sepanjang 350,93 km, jalan tol yang beroperasi sepanjang 184,73 km, pembangunan jembatan sepanjang 3.966,34 km, serta pembangunan *flyover* dan *underpass* sepanjang 2.970,28 meter. Realisasi keuangan Ditjen Bina Marga pada tahun 2024 mencapai Rp69,523 triliun atau 98,51%, dengan realisasi fisik sebesar 99,04%. Selain itu, telah dilaksanakan percepatan konektivitas jalan daerah tahun 2024 sebesar Rp3,039 triliun untuk jalan sepanjang 366,73 km dan jembatan sepanjang 1.737,12 meter.

Portofolio teknis Bina Marga juga mencakup berbagai proyek infrastruktur yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2022, Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp39,7 triliun yang digunakan untuk program infrastruktur konektivitas, dan berhasil menyerap anggaran sebesar Rp54,4 triliun atau 93,71% dengan

realisasi fisik sebesar 96,13%. Proyek-proyek unggulan yang telah dikerjakan antara lain pembangunan Jembatan Layang Kemang B di Serang, Banten, dengan panjang total 382 meter yang mulai dikontrak pada 24 Januari 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp46 miliar, serta Jembatan Layang Sumarecon (Jembatan KH Noer Alie) di Bekasi yang memiliki panjang 1 km dan lebar 22 meter dengan biaya Rp200 miliar. Dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Ditjen Bina Marga juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan Tol IKN seksi 1A dan 1B. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 104 km jalan nasional baru pada tahun 2025.

Selain proyek fisik, Direktorat Jenderal Bina Marga juga mengembangkan inovasi teknologi dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah pemanfaatan teknologi LiDAR (*Light Detection and Ranging*) yang diinstal pada drone untuk pemetaan ruas jalan. Teknologi ini dipilih karena memiliki potensi besar dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi pemetaan ruas jalan serta pembangunan *database* berbasis geospasial. Penggunaan teknologi LiDAR memungkinkan proses pemetaan menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan metode konvensional.

Di samping portofolio teknis, Direktorat Jenderal Bina Marga juga memiliki portofolio komunikasi publik yang berkembang dalam lima tahun terakhir. Bentuk portofolio ini mencakup pengelolaan kanal informasi resmi, penyusunan materi publikasi, dokumentasi kegiatan, produksi konten visual, serta penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai platform media sosial. Melalui portofolio komunikasi publik yang dikelola secara konsisten, Direktorat Jenderal Bina Marga dapat menyampaikan informasi program kerja kepada masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas dan format yang lebih mudah diakses. Karakter media sosial yang mengutamakan percakapan, komunitas, dan distribusi konten membuat pengelolaan pesan perlu dilakukan secara konsisten dan terencana (Tuten & Solomon, 2021). Seluruh portofolio yang telah dihasilkan, baik di bidang teknis maupun komunikasi, mencerminkan peran strategis Bina Marga dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.